

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** yang disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja, mewajibkan bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang disusun oleh masing-masing instansi.

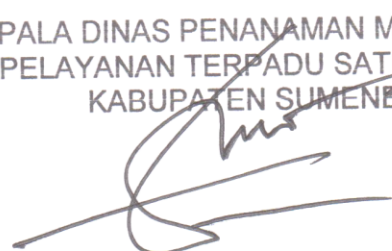
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada perencanaan strategis dengan memperhitungkan situasi, kondisi potensi peluang dan kendala yang ada. LKjIP mengandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan program dan kegiatan realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami perlukan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kedepan.

Akhir kata, dalam kesempatan ini kami patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih pada pihak yang membantu penyusunan LKjIP ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Sumenep, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP



ABDUL MADJID, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19661108 198809 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi, Disamping itu, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan satuan kerja Pelaksana Pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian dengan mengikuti Visi RPJMD Kabupaten Sumenep yaitu "SUPERMANTAP".Yaitu Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep adalah laporan capaian kinerja (performance result) sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2017. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategik (Renstra) Tahun 2016-2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep melaksanakan 40 (empat puluh) kegiatan dari 10 (sepuluh) program untuk mendukung pencapaian 1 (satu) misi 2 (dua) tujuan 2 (dua) sasaran. Keberhasilan pencapaian tersebut diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja sasaran.

Tabel Ikhtisar-1
Hasil Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017

RENSTRA				CAPAIAN KINERJA	INTERPRESTASI		
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
Meningkatnya jumlah investor berskala regional dan Nasional (PMDN / PMA)	1	Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal					
		- Nilai Investasi PMDN Tahun 2017			425,68%	Sangat Berhasil	
		- Nilai Investasi PMA Tahun 2017			0%	Kurang Berhasil	
			1 Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi			
				- Nilai Investasi PMDN Tahun 2017	86,97%	Sangat Berhasil	
				- Nilai Investasi PMA Tahun 2017	0,00%	Kurang Berhasil	
		2	Jumlah Investor				
			Jumlah Investor Tahun 2017			69,21%	Cukup Berhasil
				2 Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	(132,13%)	Kurang Berhasil
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA				74,96	BERHASIL		

(secara terinci ada dalam Bab.III)

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian dalam LKjIP tahun 2017 ini menunjukkan keberhasilan masing-masing tujuan dan sasaran, namun demikian masih dijumpai beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep. Kekurangan dan upaya perbaikan yang akan dilakukan telah diuraikan secara lengkap pada bab evaluasi akuntabilitas kinerja.

Sumenep, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP

ABDUL MADJID, S.Sos, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19661108 198809 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah	4
B. Permasalahan Utama (STRATEGIC ISSUED)	4
1. Permasalahan Pembangunan	4
2. Isu Strategis	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
1. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6
A. Visi dan Misi	6
B. Tujuan dan Sasaran	8
C. Rencana Kinerja Tahunan(RKT) TA. 2017	10
2. Perjanjian Kinerja	20
a. Sekretariat	20
b. Bidang Penanaman Modal	24
c. Bidang Pengendalian dan Penyuluhan	26
d. Bidang Perizinan	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
1.1. Perbandingan antara Target Tahun 2017 dan Realisasi Kinerja Tahun 2017	33
1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016 dan Beberapa Tahun Terakhir	35
1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target Jangka Menengah	

yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	37
1.4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan Atau peningkatan / penurunan serta alternatif Solusi tahun 2017	39
1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	42
a. Sumber Daya Manusia	42
b. Sumber Daya Dana	42
1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	48
B. REALISASI ANGGARAN	52
1. Anggaran Pendapatan	52
2. Anggaran Belanja	53
BAB IV PENUTUP	57
1. Tinjauan Umum	57
2. Tinjauan Khusus	58
3. Saran Tindak Lanjut	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran	9
Tabel 2	Target Kinerja	10
Tabel 3	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	11
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Sekretaris	20
Tabel 5	Perjanjian Kinerja Bidang Penanaman Modal	24
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Bidang Pengendalian dan Penyuluhan	26
Tabel 7	Perjanjian Kinerja Bidang Perizinan	28
Tabel 8	Jumlah Target Izin Yang Diterbitkan	29
Tabel 9	Nilai Angka dan Interpretasi Pencapaian Kinerja	34
Tabel 10	Perbandingan antara Target Tahun 2017 dan Realisasi Kinerja Tahun 2017	36
Tabel 11	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016 dan Beberapa Tahun Terakhir	38
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	33
Tabel 13	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	44
Tabel 14	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	45
Tabel 15	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
Tabel 16	Realisasi PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep	53
Tabel 17	Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2017	54
Tabel 18	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017 ..	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	STRUKTUR ORGANISASI	3
Gambar 2	SUPERMANTAP	6
Gambar 3	SLOGAN PERIZINAN	8

DAFTAR LAMPIRAN

RENCANA PERUBAHAN RPJMD 2016 -2021

BERLAKU EFEKTIF 2019

1. PENYELARASAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DENGAN RPJMD PEMKAB. SUMENEP
2. ISU-ISU STRATEGIS DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN SUMENEP 2016-2021
3. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPM&PTSP KAB. SUMENEP 2016-2021
4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA 2016-2021
5. KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TARGET PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAB. SUMENEP 2016-2021
6. INDIKATOR TUJUAN SKPD YANG MENGACU PADA INDIKATOR SASARAN RPJMD
7. INDIKATOR SASARAN SKPD YANG MENGACU PADA INDIKATOR TUJUAN RENSTRA SKPD
8. INDIKATOR PROGRAM SKPD YANG MENGACU PADA INDIKATOR SASARAN RENSTRA SKPD
9. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD.

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep No 60 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, maka DPM&PTSP Kabupaten Sumenep mempunyai uraian tugas sebagai berikut : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 6 (enam) Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional; sebagaimana struktur organisasi berikut:

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Program Dan Keuangan
3. Bidang Penanaman Modal ;
 - a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Penanaman Modal
 - b. Seksi Promosi Investasi dan Monitoring Penanaman Modal
4. Bidang Pengendalian Dan Penyuluhan ;
 - a. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian
 - b. Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Penyuluhan
5. Bidang Perizinan ;
 - a. Seksi Pendaftaran Dan Penelitian Izin
 - b. Seksi Penetapan Dan Penerbitan izin
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai komponen Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok : ***Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep***, khususnya dalam bidang penanaman modal, sebagaimana peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2016.

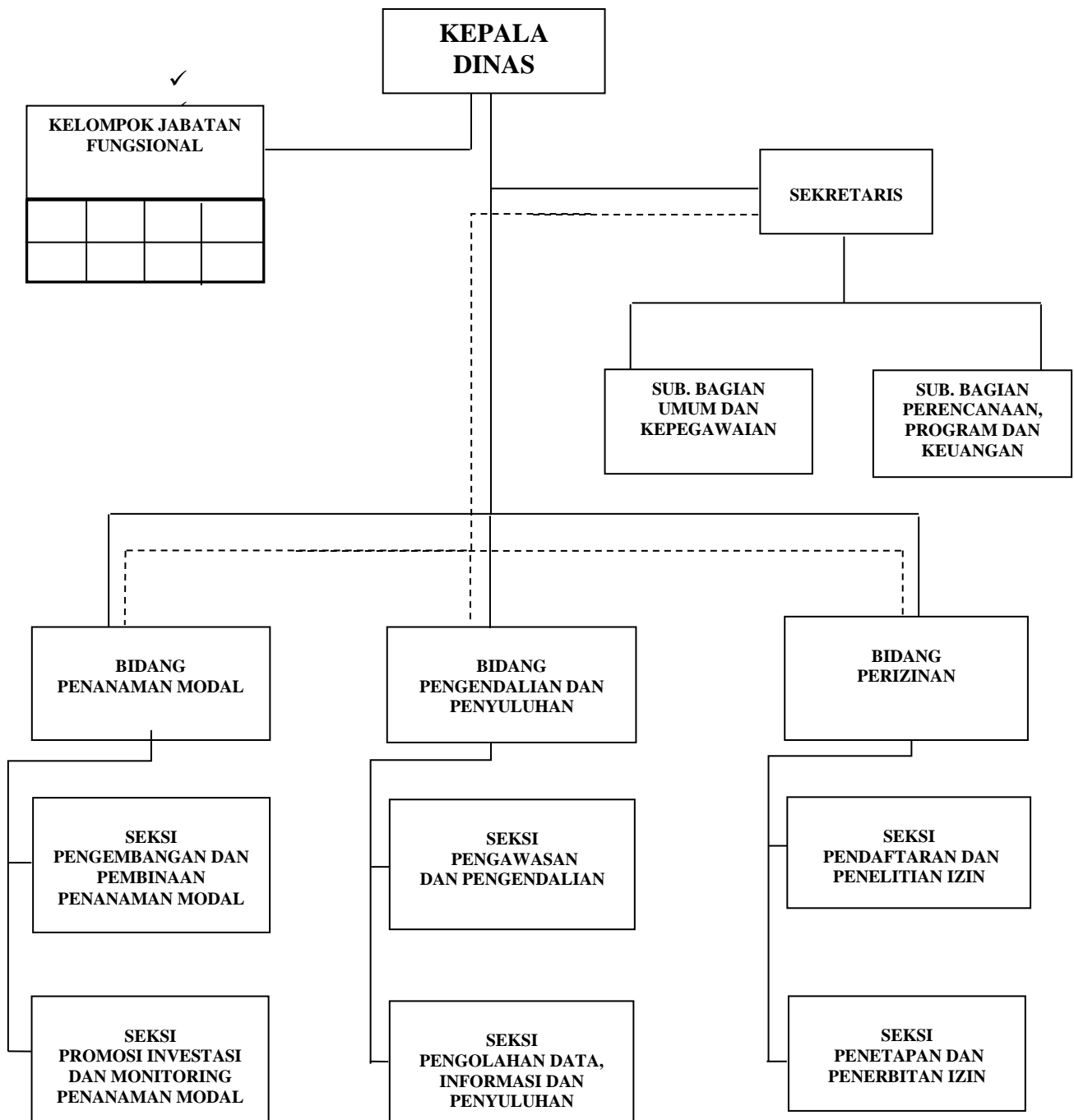
Untuk melaksanakan Tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;

- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal yang meliputi pengembangan dan pembinaan penanaman modal, promosi dan kerjasama, Pengolahan Data dan sistem informasi penanaman modal;
- d. Pelaksanaan penyusunan program kerja;
- e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan, pengendalian dan penyuluhan;
- f. Pelaksanaan koordinasi proses Perizinan;
- g. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian Perizinan;
- h. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagaimana tercantum dalam PERDA KABUPATEN SUMENEP NOMOR 9 TAHUN 2016 sebagaimana struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep berikut ini.

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU(DPM&PTSP)
KABUPATEN SUMENEP
(PERDA KABUPATEN SUMENEP NOMOR 9 TAHUN 2016)



———— = GARIS KOMANDO
 - - - - - = GARIS KOORDINASI

A. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Perkembangan Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) di Kabupaten Sumenep selama 2 (tahun) tahun terakhir meningkat. Pada tahun 2015 sebesar Rp. 396.069.566.864,- meningkat menjadi Rp. 484.888.472.384.- pada tahun 2016, atau meningkat kira-kira sebesar 22,43%. Beberapa upaya yang dilakukan oleh DPM&PTSP Kabupaten Sumenep dalam rangka meningkatkan investasi tersebut antara lain dengan mengikuti/mengadakan pameran baik pada skala regional maupun nasional.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Persoalan bidang penanaman modal antara lain : (1) Pencapaian investasi masih belum optimal; (2) Keterbatasan SDM yang kompeten mengelola investasi daerah menghadapi MEA; (3) Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah untuk penunjang peningkatan daya tarik investasi dan mendukung operasional investasi di daerah masih terbatas; (4) Sistem keamanan yang menjamin investor yang masih bermasalah; (5) Belum adanya informasi kebutuhan investasi; (6) Mekanisme monev perizinan belum optimal.

2. ISU STRATEGIS

Untuk lebih menjamin efektifitas dan manfaat dari berbagai program pembangunan yang dirumuskan Tahun 2016-2021, salah satu langkah antisiatif yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang dihadapi Kabupaten Sumenep di masa lima tahun ke depan. Isu-isu strategis yang dirumuskan diperoleh dari FGD (Focussed Group Discussion) yang melibatkan sejumlah pakar. tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparatur birokrasi di Kabupaten Sumenep.

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif diantaranya adalah (1) kurang memadainya kapasitas dan kualitas infrastruktur untuk mendukung investasi yang sudah ada dan investasi baru; (2) masih cukup panjangnya proses perizinan investasi dibandingkan dengan negara-negara

sekawasan lainnya; (3) belum lancarnya implementasi pelimpahan wewenang perizinan dari beberapa instansi yang mulai dialihkan wewenangnya ke daerah tujuan investasi karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan sarana pendukungnya; (4) masih bervariasinya kelembagaan dan model pengelolaan PTSP; serta (5) banyaknya peraturan daerah (Perda) yang bermasalah sehingga menambah beragamnya pungutan daerah. Dari berbagai permasalahan yang diidentifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses perizinan di Indonesia masih terlalu panjang dan hal ini mempersulit pihak-pihak yang ingin berinvestasi dan melakukan usaha di Indonesia. Hal ini belum sesuai dengan tujuan sistem pelayanan yang diinginkan dalam PTSP, sehingga peringkat *Doing Business* Indonesia selalu pada posisi terendah.

Namun demikian, walaupun PTSP telah dibentuk oleh sebagian besar unit penyelenggara pelayanan publik baik pusat maupun daerah, ternyata belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara signifikan. Hal tersebut terlihat masih besarnya tantangan Indonesia dalam upaya mengembangkan dunia usaha. Tantangan tersebut diantaranya adalah kurangnya tenaga kerja terdidik, infrastruktur yang buruk dan kerangka kebijakan yang berbelit-belit (World Bank, 2012). Disamping itu, hasil berdasarkan *Doing Business Survey 2015* memperlihatkan bahwa Indonesia berada pada ranking 114, jauh dibawah Singapura yang sudah langganan di posisi pertama, Malaysia telah menempati peringkat ke-18, Thailand (ke-26), Vietnam (ke-78), Filipina (ke-95), dan Brunei Darussalam (ke-101). Indonesia diperingkat 114 hanya unggul atas Kamboja di posisi ke-135 dan Timor Leste yang tertinggal di posisi ke-172.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan dan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan merupakan langkah awal yang dimiliki oleh instansi untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahunan, yaitu Tahun 2017 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan DPM&PTSP di Kabupaten Sumenep, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur.

1. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Visi dan Misi

1. Visi

Pada hakekatnya membentuk visi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan yang berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana DPM&PTSP harus dibawa. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh DPM&PTSP. Pernyataan Visi RPJMD Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Gambar 2

“SUPER MANTAP”
Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Penjelasan Makna Visi

Perubahan paradigma dalam kegiatan pemerintahan diperlukan agar pemerintah senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dalam masyarakat. Perubahan paradigma dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang baik (good governance), memperbaiki kinerja sektor publik dan menghilangkan praktek administrasi yang tidak sehat. Pemerintah harus secara terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan agar dapat meningkatkan pelayanan prima yang menjadi tuntutan masyarakat.

2. MISI

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep harus mempunyai misi yang jelas. Misi tersebut merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh DPM&PTSP Kabupaten Sumenep, yaitu masuk pada Misi ke 3 RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 ***“Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi”***

Pernyataan Motto Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep

Gambar 3

1. *Prima dalam Pelayanan, Konsisten dalam Pelaksanaan”.*
2. *Menu Layanan DPM&PTSP “Jamu Singset Supermantap “ (Jelas, Mudah , Singkat, Sederhana dan Tuntas guna mewujudkan Sumenep yang semakin sejahtera, Pemerintah yang bersih, mandiri, agamis, nasionalis, transparan, adil dan professional).*

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Adapun keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021 dengan Tujuan dan Sasaran RENSTRA sebagaimana table berikut ini.

Tabel 1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

RPJMD				RENSTRA			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan kegiatan ekonomi, kualitas kelembagaan UMKM Koperasi dan pengembangan wisata daerah serta meningkatkan kinerja penanaman modal / investasi daerah, industri perdagangan	1 % Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya jumlah investor berskala regional dan nasional (PMDN/PMA)	1 Jumlah nilai investasi penanaman modal	Meningkatnya daya tarik investasi	1 Jumlah nilai investasi	Meningkatnya nilai investasi	- Persentase peningkatan nilai investasi
	2 PDRB per kapita		2 Jumlah investor		2 Jumlah investor	Meningkatnya jumlah investor	- Persentase peningkatan jumlah investor

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagaimana table berikut ini.

Tabel 2
Target Kinerja

RENSTRA						TARGET	
TUJUAN			SASARAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA				
1 Meningkatkan jumlah investor berskala regional dan nasional (PMDN/PMA)	1	Jumlah nilai investasi penanaman modal					
		- Nilai Investasi PMDN				Rp 421.021.949.576	
		- Nilai Investasi PMA				Rp 5.015.030.000	
			1	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi		
					- Nilai Investasi PMDN	3,10%	
					- Nilai Investasi PMA	0,10%	
	2	Jumlah investor				5.129	
			2	Meningkatnya jumlah investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	9,99%	

C. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2017

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses mulai dari persiapan perencanaan kinerja, pelaksanaan koordinasi antara bidang-bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, telaah dan evaluasi, sampai dengan penetapan anggaran yang diwujudkan didalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penetapan kinerja yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berikut Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

FORMULIR RKT

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM		KEGIATAN					KET	
NO.	URAIAN	NO	URAIAN		NO.	URAIAN	No	URAIAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tujuan 1: Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Regional dan Nasional (PMDN/PMA)	-	Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal										
			- Nilai Investasi PMDN Tahun 2017	Rp 421,021,949,576									
			- Nilai Investasi PMA Tahun 2017	Rp 5,015,030,000									
	Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Investasi	-	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi										
			- Nilai Investasi PMDN Tahun 2017	3,10%									
			- Nilai Investasi PMA Tahun 2017	0,10%									
					1	Program Penataan dan Peraturan Perundang-Undangan Perizinan	1	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	1	Jumlah Tempat Usaha Yang Dikunjungi	tempat usaha	62	

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM		KEGIATAN					KET	
NO.	URAIAN	NO	URAIAN		NO.	URAIAN	No	URAIAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							2	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Jumlah Media Massa Sebagai Sarana Publikasi Peraturan Perundang-undangan Perizinan	media massa	3	
							3	Sosialisasi Perizinan	1	Jumlah Kecamatan Kepulauan sebagai tempat sosialisasi perizinan	Kecamatan Kepulauan	5	
							4	Penyusunan Standart Operating Prosedur (SOP) Perizinan	1	Dokumen Standart Operating Prosedur (SOP) Perizinan	buku	40	
					2	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan	1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Permohonan Izin	1	Jumlah Permohonan Perizinan Yang Memenuhi Syarat	permohonan izin	4,050	
							2	Peningkatan Koordinasi dan Proses Pembahasan Perizinan	1	Jumlah rapat pembahasan kajian teknis	kegiatan	100	
									2	Jumlah survey tinjauan lapangan	kegiatan	51	

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM		KEGIATAN					KET	
NO.	URAIAN	NO	URAIAN		NO.	URAIAN	No	URAIAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							3	Ketatalaksanaan Perizinan Usaha Perdagangan dan Perikanan	1	Jumlah sertifikat perizinan	sertifikat	7,630	
							4	Ketatalaksanaan Izin Mendirikan Bangunan	1	Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan	izin	400	
							5	Pelayanan Perizinan Pengusahaan Tembakau	1	Jumlah Izin Pengusahaan Tembakau yang diterbitkan	izin	1	
							6	Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah	1	Jumlah Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang diterbitkan	izin	1	
							7	Peningkatan Pelayanan Perizinan Kepulauan	1	Jumlah Izin yang diterbitkan	izin	35	
	Tujuan 1: Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Regional dan Nasional (PMDN/PMA)		Jumlah Investor - Jumlah Investor Tahun 2017	5,129									

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM		KEGIATAN					KET	
NO.	URAIAN	NO	URAIAN		NO.	URAIAN	No	URAIAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sasaran 2:												
	Meningkatnya Jumlah Investor	2.2	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	9,99%	1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1	Pengembangan Potensi Investasi Daerah	1	Jumlah Kegiatan Pameran Promosi	kegiatan	2	
					2	Program Pengembangan Data / Informasi	1	Penyusunan Profil Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	1	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi	buku	50	
							2	Penyusunan Buku Laporan Bulanan dan Tahunan Kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu	1	Jumlah Dokumen Laporan Bulanan Perizinan dan Investasi	buku	44	
									2	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Perizinan dan Investasi	buku	12	
							3	Penyusunan Profil Dinas Penanaman	1	Jumlah Dokumen Profil DPM&PTSP	buku	60	

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM		KEGIATAN					KET	
NO.	URAIAN	NO	URAIAN		NO.	URAIAN	No	URAIAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sumenep					
							4	Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	1	Jumlah Izin Prinsip	izin	11	
					3	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	1	Jumlah Unit Mobil Layanan Perizinan Keliling	unit	1	
									2	Jumlah Komputer	unit	11	
									3	Jumlah bulan kuota internet provider	bulan	6	
									4	Jumlah Aplikasi SIM Perizinan	aplikasi	3	
									5	Jumlah Unit Pengadaan Genset	unit	1	

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM		KEGIATAN					KET	
NO.	URAIAN	NO	URAIAN		NO.	URAIAN	No	URAIAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	surat	1,600	
							2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	1	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	
							3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1	Jumlah Tenaga kerja Non PNS	orang	8	
							4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	buah	728	
							5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1	Jumlah item Alat Tulis Kantor yang dibeli	item	25	
							6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jumlah Barang Cetak	item	8	
									2	Jumlah Barang Penggandaan	lembar	78,506	
							7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah komponen listrik yang diadakan	item	7	
							8	Penyediaan Bahan Bacaan	1	Jumlah surat kabar/majalah/tabl	exemplar	72	

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM		KEGIATAN					KET	
NO.	URAIAN	NO	URAIAN		NO.	URAIAN	No	URAIAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								dan Peraturan Perundang-undangan		dit yang disediakan			
							9	Penyediaan Makanan dan Minuman	1	Jumlah tersedianya makanan dan minuman	kotak	750	
							10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kegiatan	12	
							11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	kegiatan	60	
							12	Pameran Pembangunan	1	Jumlah kegiatan Pameran Pembangunan	kegiatan	1	
					2	Program peningkatan sarana dan prasarana	1	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	1	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	unit	30	
							2	Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung Kantor	1	Jumlah area gedung kantor yang dipelihara	area	1	
							3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara	unit	5	

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM		KEGIATAN					KET	
NO.	URAIAN	NO	URAIAN		NO.	URAIAN	No	URAIAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									2	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara	unit	11	
									4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	unit	20	
									5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleir	unit	167	
									6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	unit	54	
					2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1	Jumlah stel pakaian Dinas beserta perlengkapannya	stel	38	

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM		KEGIATAN					KET	
NO.	URAIAN	NO	URAIAN		NO.	URAIAN	No	URAIAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan	orang	14	
							2	Penyusunan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	1	Jumlah dokumen Rencana Kerja	dokumen	1	
									2	Jumlah dokumen perencanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang milik Daerah	dokumen	2	
					5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Jumlah Dokumen pelaporan kinerja	dokumen	4	
									2	Jumlah dokumen Hasil Pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah	dokumen	4	
									3	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset	dokumen	6	
									4	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	dokumen	24	

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM		KEGIATAN					KET	
NO.	URAIAN	NO	URAIAN		NO.	URAIAN	No	URAIAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									5	Jumlah Dokumen laporan keuangan	dokumen	60	
							2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	1	Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD	dokumen	4	

2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola dari suatu organisasi pemerintah.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja suatu organisasi. 2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah membuat penetapan kinerja (kinerja utama) tahun anggaran 2017 yaitu pada sasaran Meningkatnya jumlah investor berskala regional dan Nasional (PMDN / PMA), serta Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju kepada pelayanan prima..

Setelah ditetapkannya Tujuan dan Sasaran (masing-masing beserta indikator kinerjanya), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebagai penanggung jawab pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2021 khususnya untuk urusan Penanaman Modal, secara internal telah menetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja untuk masing-masing pejabat struktural sebagai Perjanjian Kinerja dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Tahun 2017 (Perjanjian Kinerja terlampir).

Secara ringkas kami jelaskan isi dari Perjanjian Kinerja untuk masing-masing Bidang dan Sekretariat, sebagai berikut :

a. SEKRETARIAT

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Sekretaris

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemenuhan sarana layanan perkantoran	Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	95.00%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Beserta Pemeliharaannya	90.00%
3	Meningkatnya tingkat kedisiplinan Pegawai	Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Dalam Berpakaian Dinas	95.00%
4	Meningkatnya Profesionalisme Pegawai	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	40.00%
5	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	95.00%

Penjelasan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target Kinerja Program sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan aparatur baik berupa kebutuhan bahan perkantoran, jasa tenaga kerja non pegawai, maupun bahan lain yang diperlukan, sehingga terciptanya produk kerja yang baik.
2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur beserta pemeliharaannya, sehingga diharapkan terciptanya produk kerja yang baik dan sauna kerja yang nyaman.
3. Peningkatan tingkat kedisiplin merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan proses produktifitas aparatur yang baik. Pemenuhan kebutuhan pakaian kerja diharapkan terwujudnya peningkatan kedisiplinan aparatur dalam mematuhi kewajibannya sebagai aparatur pemerintah.
4. Peningkatan profesionalime aparatur salah satunya dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan baik fungsional maupun struktural. Pendidikan dan pelatihan struktural merupakan syarat administrasi untuk menduduki jabatan eselon, sehingga mampu mengemban kewajibannya sebagai pemimpin. Elemen dalam penanaman modal harus ada aparatur yang benar-benar paham tentang seluk beluk permodalan, sehingga bisa menambah point penilaian dalam tugas dan fungsi kelembagaan dalam urusan penanaman modal.
5. Perencanaan yang baik akan menghasilkan produk kerja yang baik pula, sehingga adanya kemampuan pola berpikir komprehensif dari aparatur dalam merencanakan sesuatu, baik dalam merumuskan Perencanaan

Kinerja (RENJA), maupun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur.

Selanjutnya dari Perjanjian Kinerja Sekretaris dijabarkan ke Perjanjian Kinerja Eselon IV :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja sebagaimana penjelasan berikut ini :
 - a. Jumlah kebutuhan barang dan jasa administrasi perkantoran, sehingga terwujud kelancaran proses penyelesaian administrasi perkantoran.
 - b. Jumlah tenaga kerja Non PNS sebanyak 8 orang terdiri dari 2 orang sopir, 2 orang tenaga kebersihan, 1 orang penjaga malam dan 3 orang tenaga administrasi, sebagai penunjang terciptanya suasana tempat kerja yang nyaman.
 - c. Jumlah kegiatan Pameran Pembangunan sebanyak 1 kali kegiatan yaitu Pameran Pembangunan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sumenep. Pameran ini sebagai salah satu bentuk sarana publikasi perencanaan, kegiatan dan prestasi kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep kepada masyarakat.
 - d. Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dibeli, yaitu 1 unit Almari, 2 unit AC, 1 paket CCTV, 2 unit Meja Rapat, 20 unit Kursi Rapat, 1 unit Kursi Tamu, 1 paket Horden, 2 unit TV, beserta pemeliharaannya, sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman.
 - e. Jumlah stel pakaian kerja pegawai sebanyak 38 stel, upaya peningkatan tingkat kedisiplinan aparatur dalam berpakaian dinas.
 - f. Jumlah pegawai negeri yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 14 PNS yang direncanakan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural/Fungsional maupun peningkatan profesionalisme kerja PNS.
 - g. Jumlah Dokumen perencanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang milik Daerah sebanyak 2 dokumen, yaitu 1). Daftar Kebutuhan Barang

- Unit (DKBU) 2017 dan 2). Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Baran Unit (DKPBU) 2017. Dokumen tersebut sebagai data yang terdokumensi tentang kebutuhan barang unit sarana dan prasarana aparatur perkantoran beserta pemeliharanya.
- h. Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan dan Pemeliharaan Barang milik Daerah sebanyak 4 dokumen, yaitu 1). Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) 2017, 2). Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) 2017, 3). Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) 2018 dan 4). Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) 2018. Dokumen tersebut adalah dokumen yang terdokumentasi tentang hasil pengadaan barang dan jasa administrasi perkantiran, barang modal sarana dan prasarana apartur beserta pemeliharannya
 - i. Jumlah Dokumen Pencatatan Aset sebanyak 6 dokumen, yaitu 1). Kartu Inventaris Barang (KIB A,B, C, D, E dan F); 2). Kartu Inventaris Ruangan; 3). Buku Inventaris; 4). Buku Induk Inventaris, 5). Buku Inventaris dan Rekap, 6). Daftar Mutasi Barang dan Rekap. Dokumen tersebut merupakan hasil pencatatan atas barang sarana dan prasarana aparatur yang menjadi sumber perhitungan jumlah asset yang dikelola oleh DPM&PTSP Kabupaten Sumenep.
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan proses pelaksanaan dan target kinerja urusan perencanaan program dan keuangan dengan target kinerja sebagai berikut :
- a. Jumlah dokumen Rencana Kerja sebanyak 1 dokumen, yaitu Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018. Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran setiap tahunnya yang mengacu pada RENSTRA DPM&PTSP Kabupaten Sumenep.
 - b. Jumlah Dokumen pelaporan kinerja sebanyak 4 dokumen, yaitu 1). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, 2). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2017, 3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017, 4). Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2017.

Dokumen yang menjelaskan secara terperinci hasil target kinerja yang diperolehnya.

- c. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Laporan Fungsional dan Laporan Administratif Penggunaan APBD sebanyak 24 dokumen, yaitu 1) Laporan Fungsional per bulan,) Laporan Administratif per bulan. Dokumen tersebut merupakan gambaran penggunaan anggaran per rincian obyek belanja yang tertera dalam DPA/DPPA.
- d. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan sebanyak 60 dokumen, yaitu : 1). Buku Kas Umum (BKU) per bulan, 2). Buku Panjar per bulan, 3). Buku Bank per bulan, 4). Buku Pajak per bulan, 5). Buku Register SPP, SPM, SP2D. Dokumen tersebut menjelaskan proses pembuatan dan pencatatan pengelolaan keuangan.
- e. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebanyak 4 dokumen, yaitu : 1). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018, 2). Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 2017, 3). Anggaran Kas 2018, 4). Perubahan Anggaran Kas 2017 Dokumen tersebut menjadi acuan didalam pelaksanaan program dan kegiatan

b. Bidang Penanaman Modal

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Bidang Penanaman Modal

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengusaha yang berinvestasi	Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi	5,129
			pengusaha
2	Meningkatnya kualitas data / informasi perizinan	Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan	2
			dokumen

Penjelasan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target Kinerja Program sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Sumenep, salah satunya dengan mengikuti pameran potensi daerah yang bersifat regional maupun nasional.

2. Peningkatan penyajian data/informasi perizinan yang nantinya dapat dijadikan bahan referensi pertimbangan bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sumenep.

Selanjutnya dari Perjanjian Kinerja Bidang Penanaman Modal dijabarkan ke Perjanjian Kinerja Eselon IV :

1. Kepala Seksi Promosi Investasi dan Monitoring Penanaman Modal mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan proses pelaksanaan dan target kinerja urusan Promosi Investasi dan Monitoring Penanaman Modal dengan target kinerja sebagai berikut :
 - a. Jumlah kegiatan Pameran Investasi sebanyak 2 kegiatan, yaitu : 1). Pameran investasi berskala regional, 2). Pameran investasi berskala nasional.
 - b. Jumlah Profil Potensi Investasi Kabupaten Sumenep sebanyak 50 exemplar yang berisi data potensi sumber daya Kabupaten Sumenep, baik data pertanian dan hortikultura, perkebunan, perhutanan, sumber daya alam, serta potensi destinasi wisata.
2. Kepala Pengembangan dan Pembinaan Penanaman Modal mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan proses pelaksanaan dan target kinerja urusan Pengembangan dan Pembinaan Penanaman Modal dengan target kinerja sebagai berikut :
 - a. Jumlah Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sebanyak 60 exemplar yang berisi data pokok dan data primer DPM&PTSP Kab. Sumenep, antara lain uraian tugas dan fungsi DPM&PTSP, data personil, sarana dan prasarana, serta payung hukum perizinan (Peraturan Menteri/Kepala Badan, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati).
 - b. Jumlah Izin Prinsip yang diterbitkan sebanyak 11 izin melalui SPIPISE, serta pelaporan Izin Prinsip yang telah diterbitkan.

c. Bidang Pengendalian dan Penyuluhan

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Bidang Pengendalian dan Penyuluhan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kondisifitas keamanan berinvestasi	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Perizinan Yang Dipakai	92
			Perundang-undangan Perizinan
2	Meningkatnya kualitas data / informasi perizinan	Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan	5
			dokumen
3	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Jaringan SIMTUP	
			SIMTUP

Penjelasan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target Kinerja Program sebagai berikut :

1. Menjaga dan meningkatkan kondisifitas keamanan berinvestasi merupakan cara untuk meningkatkan iklim investasi, salah satunya dengan penyediaan payung hukum berinventasi yang jelas dan dilaksanakan dengan baik.
2. Upaya untuk menarik calon investor agar menanamkan modalnya salah satunya dengan penyediaan data izin yang telah diterbitkan baik berbentuk laporan bulanan dan tahunan dengan tingkat akurasi data yang tinggi.

Selanjutnya dari Perjanjian Kinerja Bidang Pengendalian dan Penyuluhan dijabarkan ke Perjanjian Kinerja Eselon IV :

1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan proses pelaksanaan dan target kinerja urusan Pengawasan dan Pengendalian dengan target kinerja sebagai berikut :
 - a. Jumlah Tempat Usaha Yang Dikunjungi sebanyak 62 tempat usaha, sebagai upaya penyelesaian adanya laporan masyarakat, upaya pencegahan awal pada proses penerbitan perizinan untuk

meminimalisir adanya eksese negatif, serta upaya peningkatan nilai investasi.

- b. Jumlah Media Massa Sebagai Sarana Publikasi Peraturan Perundang-undangan Perizinan sebanyak 3 media massa, yaitu : 1). banner indoor/banner outdoor, 2) Brosur, 3) Pariwara / adventorial media cetak / elektronik. Media massa tersebut sebagai sarana publikasi peraturan perundangan-undangan dan kebijakan proses perizinan, agar masyarakat mendapatkan informasi yang tidak menyesatkan, sehingga masyarakat mendapatkan pencerahan dan menghilangkan apriori yang negatif terkait proses perizinan.
 - c. Jumlah Kecamatan Kepulauan Tempat Sosialisasi Perizinan sebanyak 5 kecamatan kepulauan, sebagai upaya mengurangi disparitas jumlah nilai investasi, jumlah investor, serta pembangunan secara keseluruhan antara kecamatan daratan dan kecamatan kepulauan.
2. Kepala Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Penyuluhan mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan proses pelaksanaan dan target kinerja urusan Pengolahan Data, Informasi dan Penyuluhan dengan target kinerja sebagai berikut :
- a. Jumlah Dokumen Standart Operating Prosedur (SOP) Perizinan sebanyak 40 buku, sebagai upaya DPM&PTSP Kab. Sumenep untuk meningkatkan kualitas personel pelaksana pelayanan perizinan kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan grade penilaian tugas dan fungsi yang mengurus penanaman modal dan perizinan.
 - b. Jumlah Dokumen Laporan Bulanan dan Tahunan Perizinan dan Investasi sebanyak 56 buku, dimana dokumen yang tersusun memuat izin yang telah diterbitkan yang memberikan gambaran nyata tentang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat khususnya terkait upaya melegalkan usahanya.
 - c. Jumlah Unit Mobil Layanan Perizinan Keliling sebanyak 1 unit, dimana tujuannya “jemput bola” perizinan yang diajukan oleh masyarakat dengan melakukan publikasi dan penerimaan pendaftaran perizinan secara terjadwal di ibu kota kecamatan daratan.

- d. Jumlah Aplikasi SIM Perizinan sebanyak 3 aplikasi, sebagai upaya mengurangi waktu dalam proses perizinan, dimana masyarakat dapat mengajukan perizinan secara on line.

d. Bidang Perizinan

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Bidang Perizinan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	Persentase penerbitan izin tepat waktu	100.00%

Penjelasan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target Kinerja Program sebagai berikut :

- ✓ Memenuhi harapan masyarakat akan adanya kepastian waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan perizinan, maka penerbitan izin yang tepat waktu merupakan target kinerja yang harus diwujudkan.

Selanjutnya dari Perjanjian Kinerja Bidang Perizinan dijabarkan ke Perjanjian Kinerja Eselon IV :

1. Kepala Seksi Pendaftaran dan Penelitian Izin mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan proses pelaksanaan dan target kinerja urusan Pendaftaran dan Penelitian Izin dengan target kinerja sebagai berikut :
 - a. Jumlah Permohonan Perizinan Yang Memenuhi Syarat sebanyak 2.050 permohonan izin, Harapan tersebut akan diwujudkan dengan penyediaan formulir pendaftaran yang mengikuti peraturan perundang-undangan serta mudah dipahami cara pengisiannya oleh masyarakat, serta adanya penjelasan yang terang dan jelas tentang tata cara pengisian data dalam formulir permohonan izin tersebut.
 - b. Jumlah sertifikat perizinan sebanyak 7.630 sertifikat, dimana bentuk format sertifikat harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, serta memberikan informasi yang diperlukan terkait profil perusahaan dan bidang usaha yang dikerjakan.

- c. Jumlah Izin yang diterbitkan sebanyak 35 izin, Upaya jemput bola permohonan perizinan di kecamatan kepulauan karena terkendala sarana transportasi dan komunikasi, sehingga masyarakat kepulauan dapat menekan biaya dalam proses permohonan perizinan.
2. Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan proses pelaksanaan dan target kinerja urusan Penetapan dan Penerbitan Izin dengan target kinerja sebagai berikut :
 - a. Jumlah rapat pembahasan kajian teknis sebanyak 100 kegiatan, sebagai upaya mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Tim Teknis, sehingga penerbitan perizinan yang memerlukan kajian teknis dapat terwujud sesuai dengan peraturan perundang-undangan perizinan yang berlaku.
 - b. Jumlah survey tinjauan lapangan sebanyak 51 kegiatan, sebagai upaya mendapatkan fakta kebenaran terkait bukti fisik usaha serta perkiraan dampak ke lingkungan sekitarnya, sehingga pemberian perizinan atas usaha yang dimohonkan benar-benar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perizinan yang berlaku.
 - c. Jumlah target Izin yang diterbitkan sebanyak 4.050 izin dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 8
Jumlah Target Izin Yang Diterbitkan

NO	JENIS IZIN	JML IZIN
1	Izin Lingkungan	1
2	Izin Lokasi (dibawah 1 Ha)	5
3	Izin Prinsip (Penanaman Modal)	11
4	Izin Gangguan (Ho)	195
5	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	400
6	Izin Usaha Perdagangan	1,200
7	Tanda Daftar Gudang (TDG)	14
8	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1,250
9	Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri (TDI/IUI)	20
10	Izin Kesehatan meliputi :	

NO	JENIS IZIN	JML IZIN
a	Izin Klinik Pratama	1
b	Izin Klinik Utama	1
c	Izin Rumah Sakit Kelas C dan D	1
d	Izin Rumah Sakit Khusus Kelas A, B, C	1
e	Izin Apotek	20
f	Izin Toko Obat	1
g	Izin Toko Alat Kesehatan	1
11	Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	1
12	Izin Pembudidayaan Perikanan	5
13	Tanda Pendaftaran Kegiatan Kelautan Dan Perikanan (TPKKP)	450
14	Izin Pembelian dan Pengusahaan Tembakau	1
15	Izin Tontonan	50
16	Izin Mengumpulkan Uang/Barang	5
17	Izin Reklame/Media Luar Ruang	250
18	Izin Usaha Penyewaan / Rental Play Station (Kekayaan bersih > 50 jt)	1
19	Izin Penebangan Pohon Pemerintah	5
20	Izin Stren Kali	50
21	Tanda Daftar Usaha Parawisata (TDUP) meliputi	
a	Izin Usaha Jasa Boga	50
b	Izin Hotel / Penginapan / Rumah Kost	10
c	Izin Salon	10
d	Izin Biro Jasa Trevel	5
e	Izin Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi	5
f	Izin Jasa Transportasi Wisata	10
22	Izin Usaha Angkutan Penyeberangan	1
23	Izi Usaha Angkutan Darat	1
24	Izin Penyimpanan Sementara dan atau Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1
25	Izin Usaha Toko Moderen (IUTM)	5
26	Izin Rencana Tapak (Site Plan)	5
27	Izin Perubahan Penggunaan Tanah / Alih Fungsi Lahan	1
28	Izin Usaha Peternakan	1
-	Surat Izin Pembukaan Cabang/Perwakilan	3
	JUMLAH	4.050

Berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, dengan cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran predikat nilai capaian kinerjanya. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil dari penggunaan anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis, dengan nilai peringkat sebagai berikut :

Tabel 9
 Nilai Angka dan Interpretasi Pencapaian Kinerja

No.	Nilai Angka	Interprestasi
1	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2	70 s/d < 85	Berhasil
3	55 s/d < 70	Cukup Berhasil
4	0 s/d < 55	Kurang Berhasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Pada Bab III ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Sumenep berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016–2021. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep ini didasarkan pada Penetapan Kinerja DPM&PTSP Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 2 sasaran dan 6 indikator kinerja (*out comes*).

Adapun analisis dari capaian kinerja DPM&PTSP Kabupaten Sumenep dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target Tahun 2017 dan Realisasi Kinerja Tahun 2017.
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016 dan Beberapa Tahun Terakhir.
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Tahun 2017.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sebagaimana penjelasan berikut ini.

1.1. Perbandingan antara Target Tahun 2017 dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 10
Perbandingan antara Target Tahun 2017 dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

RENSTRA					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
TUJUAN		SASARAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA						
1	Meningkatnya jumlah investor berskala regional dan nasional (PMDN/PMA)	1	Jumlah nilai investasi penanaman modal						
		-	Nilai Investasi PMDN			Rp. 421.021.949.576	Rp. 1.792.222.900.671	425,68	
		-	Nilai Investasi PMA			Rp 5.015.030.000	Rp. 0,00	0,00	
				1	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi			
						- Nilai Investasi PMDN	3,10%	269,62%	86,97
						- Nilai Investasi PMA	0,10%	0,00%	0,00
				2	Jumlah investor		5.129	3.550	69,21
		2	Meningkatnya jumlah investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	9,99%	(13,20%)	(132,13)		
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA							74,96		

1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016 dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 11

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016 dan Beberapa Tahun Terakhir

RENSTRA				TARGET	REALISASI					
TUJUAN		SASARAN			2016		2017			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
1	Meningkatnya jumlah investor berskala regional dan nasional (PMDN/PMA)	1	Jumlah nilai investasi penanaman modal							
			Nilai - Investasi PMDN		Rp 421.021.949.576	Rp 484.888.472.384	118,74	Rp. 1.792.222.900.671	425,68	
			Nilai - Investasi PMA		Rp 5.015.030.000	Rp 0	0,00	Rp. 0,00	0,00	
			1	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi					
					Nilai - Investasi PMDN	3,10%	0,00%	0,00	269,62%	86,97
					Nilai - Investasi PMA	0,10%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
		2	Jumlah investor		5.129	4.090	87,71	3.550	69,21	
		2	Meningkatnya jumlah investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	9,99%	0,00	0,00	(13,20)	(132,13)	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							34,41		74,96	

1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

RENSTRA					TARGET AKHIR RENSTRA (sd. TAHUN 2020)	REALISASI AKUMULASI S/D TAHUN 2017	TINGKAT KEMAJUAN	
TUJUAN		SASARAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA					
1 Meningkatkan jumlah investor berskala regional dan nasional (PMDN/PMA)	1	Jumlah nilai investasi penanaman modal						
		- Nilai Investasi PMDN			Rp. 2.179.966.896.000	Rp. 2.277.111.373.055	Rp. 97.144.477.055	
		- Nilai Investasi PMA			Rp 25.100.341.023	Rp. 0,00	(Rp. 25.100.341.023)	
			1	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi			
					- Nilai Investasi PMDN	16,39%	292,04%	275,65%
					- Nilai Investasi PMA	0,60%	0,00%	(0,60%)
		2	Jumlah investor			28.467	7.874	(20.593)
		2	Meningkatnya jumlah investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	50,00%	(13,20%)	(63,20%)	

1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 10 dan Tabel 11 Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang ketercapaian dan tidak memenuhi target pencapaian kinerja, sebagai berikut :

1. Nilai Investasi PMDN Tahun Berkenaan dan Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN.

Pencapaian kinerja “Jumlah nilai investasi PMDN” mencapai 425,68%, hal ini dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Pencapaian kinerja “Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN” mencapai 86,97% dengan interpretasi **Sangat Berhasil**

Pencapaian kinerja ini disebabkan karena :

- (1) Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dilaksanakan dengan baik,
- (2) Tingkat kesadaran masyarakat akan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan semakin tinggi,
- (3) Tingkat kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di Kabupaten Sumenep semakin tinggi,
- (4) Adanya komitmen yang tinggi pada pemangku kebijakan untuk menerapkan kepastian hukum yang akuntabel,
- (5) Kesadaran masyarakat guna membangun daerahnya semakin tinggi dengan aktif memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (6) Adanya kepastian hukum yang mengatur regulasi penanaman modal baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (7) Adanya jaminan keamanan yang didukung semakin menurunnya angka kriminalitas sehingga mengakibatkan kelancaran dalam melakukan penanaman modal.
- (8) Adanya peningkatan pendapatan masyarakat sehingga daya beli semakin meningkat yang nota bene mengakibatkan roda perekonomian semakin pesat.

2. Nilai investasi PMA dan Persentase Peningkatan Realisasi investasi PMA

Pencapaian kinerja “nilai investasi PMA” mencapai 0,00%, dengan interpretasi **Kurang Berhasil**,

Pencapaian kinerja “Persentase Peningkatan Realisasi investasi PMA” mencapai 0,00%, dengan interpretasi **Kurang Berhasil**

Hal ini terbentur dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, pada Bagian Kedua “Kewenangan Pemberian Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal oleh Pemerintah Pusat”, Pasal 6 ayat (1) huruf (b) angka (5) yang menyatakan “Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari Pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain, sehingga kewenangan pemberian izin dan fasilitas penanaman modal merupakan kewenangan BKPM RI bukan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

Indikator-indikator kinerja ini akan dihapus pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 yang akan berlaku efektif pada tahun 2019.

3. Jumlah Investor

Pencapaian kinerja “Jumlah investor” sebesar 69,21% atau sebanyak 3.550 investor dari target 5.129 investor. Pencapaian kinerja ini dikategorikan **Cukup Berhasil**, namun kurang dari target yang telah ditentukan, sehingga perlu adanya langkah-langkah yang lebih konkrit lagi, yaitu

(1). Mengembangkan software perizinan yang telah ada.

- (2). Penambahan waktu pelaksanaan penyuluhan dan pengendalian.
 - (3). Lebih maksimal dalam mengumpulkan data potensi investasi secara analisa akademik.
4. Persentase Peningkatan Jumlah Investor

Pencapaian target indikator kinerja untuk “Persentase Peningkatan Jumlah Investor” kurang menggembirakan dengan interpretasi ***Kurang Berhasil***, hal ini diakibatkan karena :

- Pengusaha yang sudah maju belum mampu menjadi inspirasi dan dorongan bagi masyarakat untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya
- Modal usaha kerap menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usaha.
- Selain karena akses terhadap modal usaha terasa sulit bagi masyarakat, ketakutan untuk meminjam dan berutang menjadi alasan umum yang menghambat.
- Kurang tersedianya infrastruktur yang handal (seperti listrik, telekomunikasi, air bersih, dan jalan raya) dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut perlu dilakukan upaya yang komprehensif dengan melibatkan semua SKPD terkait, diantaranya :

- Lebih memberdayakan dan memperkuat lembaga koperasi, UKM secara khusus.
- Penyediaan teknologi informasi yang mencakup berbagai kebutuhan sehari-hari penggunaannya.
- Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang handal (seperti listrik, telekomunikasi, air bersih, dan jalan raya) dan sumber daya manusia yang berkualitas.
- Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi

bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

- Perlu adanya penyederhaan persyaratan berkas perizinan.
- Adanya petugas pelayanan khusus dari SKPD terkait yang ditugaskan pada front office pelayanan perizinan di DPM&PTSP Kabupaten Sumenep guna menunjang peningkatan koordinasi.

1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep perlu didukung oleh sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep identik dengan jumlah pegawai yang ada pada saat ini, dengan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat akan menghasilkan keluaran yang optimal. Idealnya jumlah pegawai yang ada berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) adalah 50 orang, akan tetapi kondisi riil jumlah pegawai yang ada hanya sebanyak 43 orang termasuk tenaga outsourcing sebagai Administrasi Perizinan 3 (tiga) orang, Cleaning Service 2 (dua) orang, Driver 2 (dua) orang dan Penjaga Malam 1 (dua) orang,

b. Sumber Daya Dana

Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep mendapatkan dana berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tercantum dalam APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017 bahwa plafon Belanja Langsung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.151.697.915,-, dan pagu Belanja Langsung berdasarkan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.401.612.915,- atau naik sebesar 11,61%, alokasi tersebut tidak cukup untuk melaksanakan program/kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja urusan DPM&PTSP Kabupaten Sumenep. akibat yang ditimbulkan adalah tidak maksimalnya pencapaian target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditentukan.

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan Anggaran yang digunakan secara langsung untuk program pembangunan.

Alokasi dan realisasi anggaran dan Target Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut :

Tabel 13
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

RENSTRA						ANGGARAN	% ANGGARAN	
TUJUAN			SASARAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA				
1	Meningkatnya jumlah investor berskala regional dan nasional (PMDN/PMA)	1	Jumlah nilai investasi penanaman modal			Rp. 904.663.400	51,98%	
			- Nilai Investasi PMDN					
			- Nilai Investasi PMA					
				1	Meningkatnya nilai investasi			Persentase Peningkatan Realisasi Investasi
								- Nilai Investasi PMDN
								- Nilai Investasi PMA
				2	Jumlah investor			Rp. 835.784.450
				2	Meningkatnya jumlah investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor		

Tabel 14
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	% CAPAIAN
<p>Sasaran Program Meningkatnya kondisifitas keamanan berinvestasi</p> <p>Program Program Penataan dan Peraturan Perundang-Undangan Perizinan</p>	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Perizinan Yang Dipakai	92	108	117,39	Rp. 321.743.400	Rp. 320.960.400	99,76
<p>Sasaran Program Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan</p> <p>Program Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan</p>	Persentase penerbitan izin tepat waktu	100,00%	99,47%	99,47	Rp. 582.920.000	Rp. 548.532.200	94,10
<p>Sasaran Program Meningkatnya pengusaha yang berinvestasi</p> <p>Program Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</p>	Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi	5.129	3,550	69,21	Rp. 206.591.000	Rp. 181.992.841	88,09
<p>Sasaran Program Meningkatnya kualitas data / informasi perizinan</p>	Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan	7	7	100,00	Rp. 180.000.000	Rp. 179.712.000	99,84

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	% CAPAIAN
Program Program Pengembangan Data / Informasi Sasaran Program Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi Program Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Jaringan Sistem Informasi Manajemen Satu Pintu (SIMTUP)	1	1	100,00	Rp. 449.193.450	Rp. 433.256.050	96,45

Tabel 15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

RENSTRA					% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	
TUJUAN		SASARAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA					
1 Meningkatkan jumlah investor berskala regional dan nasional (PMDN/PMA)	1	Jumlah nilai investasi penanaman modal				96,11	32,05	
		- Nilai Investasi PMDN			425,68			
		- Nilai Investasi PMA			0,00			
			1	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi			
					- Nilai Investasi PMDN			86,97
					- Nilai Investasi PMA			0,00
		2	Jumlah investor			69,21	95,11	63,65
		2	Meningkatnya jumlah investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	(132,13)			
NILAI RATA - RATA					74,96	95,61	47,85	

Capaian Kinerja 74,96% dengan katagori **BERHASIL** , sedangkan persentase penyerapan anggaran pembangunan sebesar 95,61% dengan katagori **CUKUP EKONOMIS** dan selanjutnya untuk Capaian Tingkat Efesiensi Tahun 2017 diperoleh nilai sebesar 32,05 dengan hasil katagori **EFISIENSI**.

1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep perlu didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1 RPJMD

- Sasaran Strategis : Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Regional dan Nasional (PMDN/PMA)
- Indikator Kinerja : Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal
- Nilai Investasi PMDN
 - Nilai Investasi PMA

RENSTRA

- Sasaran Strategis : Meningkatnya Nilai Investasi
- Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Realisasi Investasi

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, adalah

- a. Pengawasan dan Pengendalian Perizinan, jumlah anggaran Rp. 144.778.000,- memberikan kontribusi dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :
- Pengawasan dan pengendalian intern kepada petugas yang melaksanakan proses pendaftaran sampai penerbitan perizinan dalam mengetrapkan peraturan perundang-undangan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ditentukan.
 - Pengawasan dan pengendalian kepada pelaku usaha untuk mematuhi izin yang diperolehnya sebagai dasar hukum memulai usahanya, sehingga ada efek jera yang menyeluruh kepada pelaku usaha lainnya.

- b. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, jumlah anggaran Rp. 35.524.500,- Sosialisasi Perizinan, jumlah anggaran Rp. 49.270.000,- Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Perizinan, jumlah anggaran Rp. 91.387.900,- ikut andil memberikan kontribusi dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :
- Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Perizinan melalui sarana media luar ruang sangat efektif menyampaikan informasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha, baik melalui penempatan banner indoor/outdoor, leaflet, iklan advertorial dll.
 - Dengan publikasi ini masyarakat paham tentang hakekat, manfaat legalitas perizinan, sehingga masyarakat terdorong untuk melegalkan kegiatan usahanya.
- c. Peningkatan pelayanan pendaftaran permohonan izin, jumlah anggaran Rp. 21.000.000, memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :
- Pengetrapan SOP/SPP urusan penerbitan perizinan dilaksanakan dengan cepat, cermat, akurat dan murah.
 - Kehandalan aparatur yang menjalankan SOP/SPP penerbitan perizinan dilihat dari aspek intelegensi, aspek pendidikan dan aspek mental sebagai pelayan masyarakat.
- d. Peningkatan Koordinasi dan Proses Pembahasan Perizinan, jumlah anggaran Rp. 122.200.000,-, memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :
- Kehandalan aparatur yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dilihat dari aspek intelegensi, aspek pendidikan dan aspek mental sebagai pelayan masyarakat.
 - Partisipasi aktif dari instansi yang terkait dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap penerbitan izin.
 - Terhapusnya ego sektoral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Ketatalaksanaan perizinan usaha perdagangan dan perikanan, jumlah anggaran Rp. 54.789.700,-
- f. Ketatalaksanaan izin mendirikan bangunan, jumlah anggaran Rp. 72.375.000,-, Pelayanan Perizinan Pengusahaan Tembakau,

jumlah anggaran Rp. 20.600.000,-, Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, jumlah anggaran Rp. 84.600.000,- Peningkatan Pelayanan Perizinan Kepulauan, jumlah anggaran Rp. 172.967.500,- turut andil memberikan kontribusi dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena

- Melakukan sosialisasi betapa pentingnya surat ijin usaha dalam mengembangkan dan memperluas jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat.
- Melakukan sosialisasi betapa pentingnya izin mendirikan bangunan dan izin perusahaan tembakau dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin-izin usaha lainnya.
- Melakukan pemendekan jalur birokrasi pengurusan izin usaha dengan mengetrapkan PATEN disetiap kecamatan.

2. RPJMD

Sasaran Startegis : Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Regional dan Nasional (PMDN/PMA)

Indikator Kinerja : Jumlah Investor

RENSTRA

Sasaran Startegis : Meningkatnya Jumlah Investor

Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Jumlah Investor

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, adalah :

a. Pengembangan Potensi Investasi Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 181.992.841,-, memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :

- Sebagai penyebar informasi potensi investasi di Kabupaten Sumenep kepada masyarakat di luar Kabupaten Sumenep.
- Sebagai motivasi kepada UMKM agar meningkatkan kualitas produksinya yang berorientasi ekspor melalui sarana pendirian stand pameran potensi investasi yang diikuti oleh DPM&PTSP kabupaten Sumenep.

b. Penyusunan Profil Potensi Investasi Kabupaten Sumenep dengan anggaran Rp. 40.000.000,-, Penyusunan Buku Laporan Bulanan dan Tahunan Kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan anggaran

Rp. 49.712.000,- Penyusunan Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kabupaten Sumenep, jumlah anggaran Rp. 50.000.000,-, memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :

- Memberikan informasi data profil, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga masyarakat paham dalam mengurus ijin usahanya.
- Adanya dukungan kerjasama yang baik dari instansi terkait dalam ikut menyebarkan informasi data profil, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mendorong masyarakat yang mengajukan ijin usaha untuk turut aktif memberikan masukan atas pelayanan dan kinerja petugas pelayanan perizinan dengan memberikan tanggapan pada aplikasi indeks kepuasan masyarakat (IKM).
- Tersusunnya kode etik petugas pelayanan dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam memperoleh layanan perizinan.
- Terdistribusinya dan diterapkannya kode etik pelayanan kepada semua aparatur yang melayani kebutuhan masyarakat dalam memperoleh layanan perizinan

c. Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), jumlah anggaran Rp. 40.000.000,-, memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :

- Dalam SPIPISE ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait pengurusan izin prinsip.
- Kehandalan aparatur yang mengoperasikan SPIPISE.
- Tersedianya kelengkapan hardware dan software yang memadai.

d. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, jumlah anggaran Rp. 433.256.050,- memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :

- Dalam SIMTUP ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait perizinan, aplikasi perizinan, aplikasi layanan perizinan online, aplikasi QR-CODE, aplikasi arsip digital, aplikasi indeks kepuasan masyarakat

(IKM), aplikasi informasi dan layanan perizinan berbasis android, aplikasi tanda tangan elektronik, aplikasi izin reklame, aplikasi tanda daftar usaha pariwisata

- Instansi terkait ikut aktif dalam menyebarkan informasi terkait SIMTUP.
- Keandalan aparatur yang mengoperasikan SIMTUP.
- Tersedianya kelengkapan hardware dan software yang memadai dan terus dikembangkan setiap tahunnya.

Jumlah anggaran pembangunan untuk menunjang keberhasilan Sasaran dan Indikator Kinerja dalam Indikator Kinerja Kunci (IKU) sebesar Rp. 1.740.447.850,- dengan prosentase penyerapan sebesar 95,61% atau sebesar Rp. 1.664.453.491,- dengan katagori **CUKUP EKONOMIS.**

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep memerlukan tersedianya dana/biaya yang memadai dimanfaatkan untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan Program atau Kegiatan Pembangunan Tahun 2017. Sumber dana penyelenggaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan, dapat bersumber dari Pemerintah (APBN, APBD), Swadaya masyarakat sendiri dan atau sumber-sumber lain yang resmi (kemitraan dan lainnya). Penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2017 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 sebesar **Rp. 4.702.077.969,-** Sedangkan Target Anggaran Pendapatan sebesar **Rp 805.000.000 ,-**

Realisasi Pendapatan dan penggunaan Anggaran Belanja APBD TA. 2017 sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan jenis pungutan antara lain

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Retribusi Izin Gangguan / Keramaian
- Retribusi Izin Usaha Perikanan

Tabel 16
Realisasi PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumenep

No	Jenis Pengutan	Target	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
	Hasil Usaha Badan	805.000.000	855.267.899	50.267.899	106,24
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	293.250.000	327.997.280	34.747.280	111,85
2	Retribusi Izin Gangguan / Keramaian	506.000.000	521.879.097	15.879.097	103,14
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan	5.750.000	5.391.522	(358.478)	93,77
	JUMLAH PENDAPATAN	805.000.000	855.267.899	50.267.899	106,24

Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA. 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep tercapai sebesar **Rp. 855.267.899,-** atau **106,24%**. Pencapaian target pendapatan dari retribusi izin usaha perikanan hanya 93,77% atau sebesar Rp. 5.391.522,- dari Rp. 5.750.000,- hal ini terkait adanya kebijakan dari pemerintah pusat bahwa penanganan izin usaha perikanan laut ada di Pemerintah Provinsi, sehingga Kabupaten Sumenep hanya berwenang perizinan usaha perikanan darat atau budidaya tambak.

2. Anggaran Belanja

Realisasi penyerapan Anggaran Belanja sesuai yang dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan untuk seluruh anggaran sebesar **Rp. 4.451.599.970,-** dari jumlah anggaran pembangunan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Perubahan APBD TA. 2017 **Rp. 4.702.077.969,-**. Rincian realisasi anggaran tersebut adalah untuk Belanja Tak Langsung sebesar Rp. **2.156.215.248,-** atau **93,73%**. Sedangkan pengeluaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp. **2.295.384.722,-** atau 95,58%.

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung, merupakan pengeluaran kegiatan rutin yang terdiri dari Belanja Pegawai. Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2017 sebesar

Rp. 2.156.215.248,- atau 93,73% dari target anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 17
Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2017

No	Pos Belanja	Anggaran Perubahan APBD 2017	Realisasi Keuangan SPJ	%
1	2	3	4	5
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.300.465.054	2.156.215.248	93,73
	BELANJA PEGAWAI	2.300.465.054	2.156.215.248	93,73
	Gaji dan Tunjangan	2.056.265.054	1.930.380.248	93,88
	Gaji Pokok PNS/Uang	1.607.360.146	1.517.978.882	94,44
	Tunjangan Keluarga	153.717.467	141.396.390	91,98
	Tunjangan Jabatan	137.085.000	132.420.000	96,60
	Tunjangan Fungsional Umum	53.499.875	49.215.000	91,99
	Tunjangan Beras	98.875.026	86.107.380	87,09
	Tunjangan PPh	5.701.568	3.242.371	56,87
	Pembulatan Gaji	25.972	20.225	77,87
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	244.200.000	225.835.000	92,48

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari 10 Program dan 40 (empat puluh) kegiatan pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 2.401.612.915,-** realisasi belanja **Rp. 2.295.384.722,- (95,58%)** dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 18
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017

Uraian	Anggaran Perubahan APBD 2017	Jumlah Realisasi	%
BELANJA LANGSUNG	2.401.612.915	2.295.384.722	95,58
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	396.261.950	391.880.179	98,89
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.568.450	10.568.450	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.450.000	104.848.064	96,68
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	87.950.500	87.461.500	99,49

Uraian	Anggaran Perubahan APBD 2017	Jumlah Realisasi	%
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	11.530.000	11.527.000	99,97
Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.109.000	24.109.000	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.584.900	25.582.350	99,99
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.260.000	6.259.500	99,99
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.994.600	9.980.000	99,85
Penyediaan Makanan dan Minuman	11.250.000	11.242.500	99,93
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	60.609.500	60.604.415	99,99
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	15.000.000	14.720.000	98,13
Pameran Pembangunan	25.000.000	24.977.400	99,91
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	201.586.315	189.599.029	94,05
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	74.660.000	73.854.000	98,92
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	38.341.500	38.341.150	100,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	68.760.300	58.329.479	84,83
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	4.564.515	4.549.400	99,67
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeleir	5.260.000	5.256.600	99,94
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kumpoter	10.000.000	9.268.400	92,68
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	12.730.000	12.705.000	99,80
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12.730.000	12.705.000	99,80
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	30.000.000	16.160.723	53,87
Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000	6.160.723	30,80
Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	10.000.000	10.000.000	100,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.586.800	20.586.300	100,00
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	10.586.800	10.586.300	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI	180.000.000	179.712.000	99,84
Penyusunan Profil Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	40.000.000	40.000.000	100,00
Penyusunan Buku Laporan Bulanan dan Tahunan Kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu	50.000.000	49.712.000	99,42

Uraian	Anggaran Perubahan APBD 2017	Jumlah Realisasi	%
Penyusunan Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep	50.000.000	50.000.000	100,00
Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik	40.000.000	40.000.000	100,00
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	206.591.000	181.992.841	88,09
Pengembangan Potensi Investasi Daerah	206.591.000	181.992.841	88,09
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	449.193.450	433.256.050	96,45
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	449.193.450	433.256.050	96,45
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN	582.920.000	548.532.200	94,10
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Permohonan Izin	21.000.000	21.000.000	100,00
Peningkatan Koordinasi dan Proses Pembahasan Perizinan	128.800.000	122.200.000	94,88
Ketatalaksanaan Perizinan Usaha Perdagangan dan Perikanan	55.025.000	54.789.700	99,57
Pemungutan Retribusi IMB	72.375.000	72.375.000	100,00
Pelayanan Perizinan atau Pengusahaan Tembakau	20.600.000	20.600.000	100,00
Pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah	84.600.000	84.600.000	100,00
Peningkatan Pelayanan Perizinan Kepulauan	200.520.000	172.967.500	86,26
PROGRAM PENATAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIZINAN	321.743.400	320.960.400	99,76
Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	144.780.000	144.778.000	100,00
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	35.524.500	35.524.500	100,00
Sosialisasi Perizinan	49.395.000	49.270.000	99,75
Penyusunan Standart Operating Prosedur (SOP) Perizinan	92.043.900	91.387.900	99,29
JUMLAH	2.401.612.915	2.295.384.722	95,58

Belanja Langsung dalam anggaran pembangunan berbasis kinerja bukanlah semata-mata untuk mengoperasionalkan Belanja Modal yang diinterpretasikan sebagai belanja administrasi proyek, melainkan kegiatan non fisik yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih luas. Dalam indikator input seluruh program menunjukkan hasil pengukuran 95,58 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep sudah optimal pelaksanaannya.

1. Tinjauan Umum

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017 ini, dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi sesuai amanat terhadap :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.
2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.
3. Peraturan Bupati Sumenep No. 22 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep..

Pertanggungjawaban tersebut meliputi Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran dan Sumber Daya yang ada, serta Target Pencapaian Kinerja dari Sasaran Strategis atau pelaksanaan kebijakan, program dan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan rata-rata dari analisis :

- Capaian Rata-Rata Kinerja Keluaran dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017 sebesar 74,96% dengan katagori **BERHASIL**.
- Capaian Rata-Rata Penyerapan Anggaran Pembangunan Tahun 2017 dari alokasi anggaran pembangunan untuk membiayai tujuan dan sasaran

strategis sebesar Rp. 1.740.447.850,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.664.453.491,- dengan prosentase penyerapan sebesar 95,61% dengan katagori **CUKUP EKONOMIS**.

- Capaian Tingkat Efisiensi Tahun 2017 diperoleh nilai sebesar 47,85 dengan hasil katagori **EFISIENSI**.

2. Tinjauan Khusus

Selama tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep untuk Pencapaian target pendapatan dari retribusi izin usaha perikanan hanya 93,77% atau sebesar Rp. 5.391.522,- dari Rp. 5.750.000,- hal ini terkait adanya kebijakan dari pemerintah pusat bahwa penanganan izin usaha perikanan laut ada di Pemerintah Provinsi, sehingga Kabupaten Sumenep hanya berwenang perizinan usaha perikanan darat atau budidaya tambak.

Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran dan Sumber Daya yang ada, serta Target Pencapaian Kinerja dari Tujuan dan Sasaran Strategis atau pelaksanaan kebijakan, program dan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditinjau dari aspek Capaian Rata-Rata Penyerapan Anggaran termasuk katagori **CUKUP EKONOMIS** dan Capaian Tingkat Efisiensi dalam katagori **EFESIEN**.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target baik anggaran maupun indikator kinerja sasaran untuk Belanja Pembangunan antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas
3. Komunikasi dan sosialisasi yang kurang terjalin dengan intens dan belum adanya pemahaman yang sama antara DPM&PTSP dengan stakeholder terkait (SKPD dan publik) dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan administrasi perizinan.
4. Belum tersedianya analisa akademik tentang pengembangan potensi investasi.

3. Saran Tindak Lanjut

Guna mengatasi keterbatasan / kendala tersebut diatas diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan sangat diperlukan, untuk itu perlu juga adanya perencanaan dan klasifikasi yang baik terhadap fasilitas, sarana dan prasarana penunjang;
2. Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan, baik aspek penguasaan bahasa asing, aspek penguasaan berkomunikasi dan aspek penguasaan wawasan.
3. Perlu penyamaan persepsi dan pemahaman dimasing-masing Satker terkait tentang uraian tugas yang jelas sehingga terjadi interaksi atau hubungan yang harmonis dengan harapan pelaksanaan koordinasi dapat terlaksana dengan baik;
4. Perlu adanya kerjasama dengan para akademisi dan konsultan dalam menyusun analisa akademik tentang pengembangan potensi investasi.

Harapan kami, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Tahun 2017 ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Sumenep pada tahun mendatang.

Kami sadar bahwa LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep 2017 jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan masukan, tanggapan dan koreksi dari semua pihak guna penyempurnaan laporan ini.

Sumenep, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP


ABDUL MADJID, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19661108 198809 1 001

RENCANA PERUBAHAN RPJMD 2016 -2021

- PENYELARASAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DENGAN RPJMD PEMKAB. SUMENEP
- ISU-ISU STRATEGIS DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN SUMENEP 2016-2021
 - RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPM&PTSP KAB. SUMENEP 2016-2021
 - STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA 2016-2021
 - KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TARGET PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAB. SUMENEP 2016-2021
- INDIKATOR TUJUAN SKPD YANG MENGACU PADA INDIKATOR SASARAN RPJMD
 - INDIKATOR SASARAN SKPD YANG MENGACU PADA INDIKATOR TUJUAN RENSTRA SKPD
- INDIKATOR PROGRAM SKPD YANG MENGACU PADA INDIKATOR SASARAN RENSTRA SKPD
 - TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

PENYELARASAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DENGAN RPJMD PEMKAB. SUMENEP
 Nama Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RPJMD PEMKAB SUMENEP

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI RPJMD	KEBIJAKAN RPJMD
1	Misi 3 : Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya daya tarik investasi	1 Jumlah investor	1 Mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi dan pelaku usaha ekonomi baru	1 Menciptakan iklim investasi yang kondusif
					2 Jumlah nilai investasi		2 Meningkatkan kualitas pemanfaatan sistem informasi teknologi
							3 Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perizinan
2	Misi 4 : Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan akuntabel	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	1 Nilai SKM Unit-unit layanan Publik	1 Melakukan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Menyelenggarakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan administrasi

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
1.	Meningkatkan daya tarik investasi	1 Jumlah investor	Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	1 Mewujudkan pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan potensi investasi daerah	1 Mengembangkan Potensi Investasi Daerah	1 Program Promosi dan Kerjasama Investasi	1 Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi	1 Promosi Potensi Investasi Daerah	Jumlah Investor Yang Melakukan Investasi	
						2 Mengembangkan teknologi informasi berbasis komunikasi	1 Program Pengembangan Data/Informasi	1 Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan	1 Penyusunan Profil Investasi dan Perizinan Kabupaten Sumenep	Jumlah Dokumen Peta Investasi dan Perizinan	
		2 Jumlah nilai investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	1 Menciptakan kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan)	1 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian perizinan	1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Perizinan	1 Jumlah Peraturan Perundang-undangan Perizinan Yang Dipakai	1 Sosialisasi Perizinan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Perizinan yang disosialisasikan	
										2 Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah Tempat Usaha Yang Dikunjungi
										3 Penataan dan Penertiban Perizinan	Jumlah Penanganan Perizinan Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan
										1 Jumlah Realisasi Investasi	1 Akselerasi Pertumbuhan Investasi
						2 Meningkatkan pembinaan evaluasi PMDN	1 Program Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1 Jumlah Realisasi Investasi	2 Pembinaan dan Evaluasi PMDN	Jumlah PMDN yang dibina	
									3 Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Jumlah Izin Prinsip	

2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	1 Nilai SKM Unit-unit layanan Publik	Meningkatnya pelayanan terpadu	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Mengembangkan fasilitas pelayanan yang berorientasi pada kemudahan akses layanan	1 Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai 2 Meningkatkan pelayanan melalui pelayanan bergerak (mobile service) 3 Mengembangkan SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen terhadap kepuasan konsumen	1 Program Pelayanan Administrasi Perizinan	1 Jumlah Izin yang Diterbitkan	1 Pelayanan Permohonan pendaftaran Perizinan 2 Pelayanan Penerbitan Perizinan	Jumlah Permohonan Perizinan Yang Memenuhi Syarat Persentase Penerbitan Perizinan Yang Tepat Waktu
			Meningkatnya sarana layanan perkantoran	Hasil Survey Kepuasan Aparatur	Membangun manajemen operasional dan kualitas sumber daya aparatur yang efektif, efisien dan akuntabel dengan arah kebijakan melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM&PTSP	Melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM&PTSP	1 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administras	1 Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran	Jumlah Surat Menyurat Yang Diadministrasikan Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Kebutuhan Bahan Kebersihan dan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bahan Perkantoran Yang Disediakan Selama 1 Tahun Anggaran

									3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Sistem Informasi Yang Dikembangkan

**ISU-ISU STRATEGIS DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016-2021**

NO	ISU-ISU STRATEGIS SKPD	PROGRAM	KEGIATAN
1	Peningkatan iklim investasi yang kondusif	- Program Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	- Akselerasi Pertumbuhan Investasi - Pembinaan dan Evaluasi PMDN - Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
		- Program Promosi dan Kerjasama Investasi	- Promosi Potensi Investasi Daerah
2	Peningkatan kualitas pemanfaatan sistem informasi teknologi	- Program Pengembangan Data/Informasi	- Penyusunan Profil Investasi dan Perizinan Kab. Sumenep
3	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perizinan	- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Perizinan	- Sosialisasi Perizinan - Pengawasan dan Pengendalian Perizinan - Penataan dan Penertiban Perizinan
4	Peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan	- Program Pelayanan Administrasi Perizinan	- Pelayanan Permohonan pendaftaran Perizinan - Pelayanan Penerbitan Perizinan

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPM&PTSP KAB. SUMENEP
TAHUN 2016– 2021**

VISI	MISI	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM			
<p style="text-align: center;">“SUPERMANTAP”</p> <p>Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional.</p>	<p>Misi 3: "Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi"</p>	<p>Meningkatkan daya tarik investasi</p>	1	Jumlah investor	Meningkatnya Jumlah Investor	1	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	1	Program Promosi dan Kerjasama Investasi
			2	Jumlah nilai investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	2	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	2	Program Pengembangan Data/Informasi
			1	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Perizinan					
	2	Program Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							
	<p>Misi 4: "Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel"</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah</p>		<p>Nilai SKM Unit-unit layanan Publik</p>	<p>Meningkatnya pelayanan terpadu</p>	1	<p>Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>	1	<p>Program Pelayanan Administrasi Perizinan</p>

Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA 2016-2021

Visi : Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri,Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan							Program	SKPD	
			Pernyataan	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Misi III	Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi											
1	Meningkatnya Jumlah Investor	1 Mewujudkan pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan potensi investasi daerah	1 Mengembangkan Potensi Investasi Daerah	√	√	√	√	√	√	1	Program Promosi dan Kerjasama Investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2 Mengembangkan teknologi informasi berbasis komunikasi	√	√	√	√	√	√	1	Program Pengembangan Data/ Informasi	
	Meningkatnya Nilai Investasi	1 Menciptakan kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan)	1 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian perizinan	√	√	√	√	√	√	1	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Perizinan	
			2 Meningkatkan pembinaan evaluasi PMDN	√	√	√	√	√	√	1	Program Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
Misi IV	Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel											
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	1 Meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada kemudahan akses layanan	1 Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai	√	√	√	√	√	√	1	Program Pelayanan Administrasi Perizinan	
			2 Meningkatkan pelayanan melalui pelayanan bergerak (mobile service)	√	√	√	√	√	√			
			3 Mengembangkan SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen terhadap kepuasan konsumen	√	√	√	√	√	√			

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Target Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep, 2016 - 2021														
Visi: Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional														
Misi 3: "Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi"														
Misi 4: "Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel"														
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	URUSAN PEMERINTAHAN	SASARAN	INDIKATOR TARGET	TAHUN DASAR 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SKPD		
1	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Penanaman Modal	Meningkatnya daya tarik investasi	1	Jumlah investor	4.239	4.663	5.129	5.642	4.295	4.725	4.993	DPM&PTSP
					2	Jumlah nilai investasi	396.069.566.864	408.347.723.437	421.021.949.576	435.280.453.984	449.935.027.958	465.381.741.065	481.620.593.307	DPM&PTSP
2	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan akuntabel	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	DPM&PTSP	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	-	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik	79,00	79,42	79,83	80,25	80,67	81,08	81,60	DPM&PTSP

INDIKATOR TUJUAN SKPD YANG MENGACU PADA INDIKATOR SASARAN RPJMD

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Tujuan SKPD	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2015	2016	2017	2018	2019	
	Urusan Wajib									
1	Penanaman Modal	Jumlah investor	Orang	4.239	4.663	5.129	5.642	4.295	4.725	4.993
		Jumlah nilai investasi	Rp	396.069.566.864	408.347.723.437	421.021.949.576	435.280.453.984	449.935.027.958	465.381.741.065	481.620.593.307
2	DPM&PTSP	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik	%	79,00	79,42	79,83	80,25	80,67	81,08	81,60

INDIKATOR SASARAN SKPD YANG MENGACU PADA INDIKATOR TUJUAN RENSTRA SKPD

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Sasaran SKPD	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)
	Urusan Wajib									
1	Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	9,85	10,00	9,99	10,00	10,00	10,01	10,03
		Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	%	66,69	3,10	3,10	3,39	3,37	3,43	3,49
2	DPM&PTSP	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	79,00	79,42	79,83	80,25	80,67	81,08	81,60

INDIKATOR PROGRAM SKPD YANG MENGACU PADA INDIKATOR SASARAN RENSTRA SKPD

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program SKPD	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)
	Urusan Wajib									
1	Penanaman Modal	Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi	Pengusaha	4.239	4.663	5.129	5.642	4.295	4.725	4.993
		Jumlah Peraturan Perundang-undangan Perizinan Yang Dipakai	Peraturan Perundang-Undangan	92	92	92	92	92	92	92
		Jumlah Realisasi Investasi	Rp.	396.069.566.864	408.347.723.437	421.021.949.576	435.280.453.984	449.935.027.958	465.381.741.065	481.620.593.307
		Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan	Dokumen		4	5	5	7	4	6
2	DPM&PTSP	Jumlah Izin yang Diterbitkan	Izin	4.239	4.308	3.877	4.265	4.578	5.036	5.540

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2015)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KONDISI PADA AKHIR	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Meningkatkan daya tarik investasi	1	Meningkatnya Jumlah Investor	- Peningkatan Jumlah Investor	%	9,85	10,00	9,99	10,00	10,00	10,01	10,03	DPM&PTSP
		2	Meningkatnya Nilai Investasi	- Peningkatan Realisasi Investasi	%	66,69	3,10	3,10	3,39	3,37	3,43	3,49	DPM&PTSP
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Daerah	1	Meningkatnya pelayanan terpadu	- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	79,00	79,42	79,83	80,25	80,67	81,08	81,60	DPM&PTSP